

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan peradaban manusia dewasa ini bercirikan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua aspek kehidupan manusia.<sup>1</sup> Kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut telah mengantarkan manusia ke peradaban yang lebih modern menuju suatu globalisasi. Peradaban baru inilah yang telah menyebabkan pergeseran sistem tata nilai dalam masyarakat dari “lokal-partikular” menjadi “global-universal”.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk perkembangan di bidang teknologi informasi tersebut berawal dari diciptakannya perangkat yang dinamakan komputer.<sup>3</sup> Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti: e-commerce (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), e-banking (aktivitas perbankan melalui internet), e-government (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan e-learning (aktivitas pembelajaran melalui internet).<sup>4</sup>

Namun keberadaan internet saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, 2001, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama, hal 1.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 23.

<sup>3</sup> Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 57.

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, op.cit, hal. 23.

perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut dapat berupa spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu credit (credit card), penyebaran virus komputer, pornografi orang dewasa dan anak, penyebaran e-mail bermasalah hingga kampanye anti suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), terorisme, dan ekstremisme melalui internet.<sup>5</sup> Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "cybercrime".

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*, *EFT (electronic fund transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money loundering*, *high-tech WCC (white collar crime)*, *internet fraud* (antara lain: *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*.<sup>7</sup> Keistimewaan

---

<sup>5</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hal. 136.

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 2.

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisaksti, hal. 90.

yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.<sup>8</sup>

Salah satu penyebab utama meningkatnya aktivitas *cyberporn* di Indonesia adalah karena mudahnya seseorang untuk mengakses situs porno di warung internet (warnet) dengan tarif yang relatif murah dan terjangkau, yaitu antara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) setiap jamnya. Bahkan saat ini di tempat umum, seperti: hotel, restoran, universitas/sekolah, halte, bandara dan stasiun, telah dilengkapi dengan teknologi *wireless fidelity* (*wi-fi*) yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses internet secara gratis.

Sebagai langkah awal penanggulangan *cyberporn*, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan tindakan dengan pemblokiran beberapa situs porno sejak tahun 2010,<sup>9</sup> Selain itu pula pemerintah Indonesia membentuk "*Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi*" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012, dimana salah satu tugasnya adalah untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi.<sup>10</sup> Seiring dengan meningkatnya aktivitas

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Detik.com, *Tifatul: 1 atau 2 Bulan Lagi Situs Porno Akan Diblok di Indonesia*, <<http://news.detik.com/read/2010/07/14/175649/1399330/10/tifatul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nd992203605>>. diakses tanggal 8 Maret 2017.

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi*, LN Nomor 66 Tahun 2012. Pasal 4 Huruf c.

*cyberporn* di Indonesia, maka seharusnya Pemerintah sudah memiliki suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan “*criminal policy*” yang lebih efektif, baik melalui sarana penal “*hukum pidana*” maupun sarana non-penal “*luar hukum pidana*”.

Berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan terhadap kejahatan *cyberporn*, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tetapi undang-undang tersebut masih memiliki kekurangan dimana dianggap belum memadai untuk mengimbangi perkembangan kejahatan *cyberporn* yang semakin hari semakin kompleks. Kekurangan tersebut meliputi pemberian batasan tentang pornografi itu sendiri yang tidak jelas, hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggung jawabkan terhadap kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.<sup>11</sup>

Begitu pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa ketentuan mengenai delik kesusilaan yang dapat digunakan untuk tindak pidana *cyberporn*. Namun pasal-pasal tersebut hanya mengatur secara umum dan abstrak sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum

---

<sup>11</sup> Andi hamzah dan Niniek Suparni, Op.cit, hal. 104.

khususnya terhadap KUHP. Oleh karena itu pada dasarnya suatu undang-undang itu bersifat statis, sementara aktivitas *cyberporn* sendiri didunia maya terus berkembang seiring berkembangnya juga teknologi informasi dan sumber daya manusianya. Maka upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* tersebut tidaklah cukup hanya digunakan pada kebijakan penal yang bersifat *repressive* semata dengan menerapkan undang-undang yang ada, tetapi harus juga didukung dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non-penal yang lebih focus terhadap fungsi pencegahan “*preventif*”

Oleh sebab itu berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengangkat penelitian hukum dengan judul :

**“Analisa Yuridis Normatif Kebijakan Preventif dan Represif Dalam Penanggulangan Kejahatan Yang Dapat Digunakan Terhadap Tindak Pidana Cyberporn Di Indonesia”**

**B. Rumusan Permasalahan**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Preventif dan Represif penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan terhadap *cyberporn* di Indonesia?
2. Bagaimana Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan represif dan preventif penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan terhadap *cyberporn* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya baik melalui sarana penal maupun non-penal, termasuk pula didalamnya pengkajian terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini serta pembaruan KUHP di masa mendatang, sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para lembaga penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang terpadu di

Indonesia dalam proses penanggulangan tindak pidana *cyberporn* mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis dan praktis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan masukan oleh :

##### **1. Hakim**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim. Sehingga proses pengambilan keputusan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

##### **2. Jaksa Penuntut Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan. Dan juga dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pola pemikiran, penalaran, pemahaman, dan tambahan pengetahuan serta pola kritis terhadap penulis dan pembaca tentang pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

##### **3. Terdakwa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi hakim dalam hal melakukan proses pengambilan keputusan

sehingga dalam hal menjatuhkan putusan agar tetap memperhatikan kepentingan psikologis terdakwa.

#### 4. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran terhadap masyarakat bahwa subjek kejahatan *cybercrime* tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga sebagai korban dari kejahatan itu sendiri.

### F. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.<sup>13</sup> Untuk mendapatkan hasil yang bernilai tinggi serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sangat tepat. Sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan hukum yang akurat baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data-data ini diperlukan agar skripsi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV Rajawali. Hal 1.

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan H Abu Ahmad, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Angkasa. Hal 1.



ini dapat memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Metode penulisan yang digunakan penulis yakni Yuridis Normatif.

Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini membutuhkan beberapa jenis bahan hukum yang beberapa sumber hukum yang berbeda yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornoaksi dan Pornografi;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum diperoleh dari Ensiklopedi, kamus, glossary, dan lain lain.

d. Teknik pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan teknik Studi

Pustaka, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dari beberapa sumber data kepustakaan (*Library Research*) yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan *cyberporn* yang dapat digunakan di Indonesia.

Bahan Hukum sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis lalu dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, kemudian hasil analisis data tersebut disajikan secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah bahan hukum dianalisis, Penulisan Hukum ini menggunakan tipe penulisan Yuridis Normatif.

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah :

1. Analisa Isi, berdasarkan teknik ini penulis akan melakukan analisis terhadap data primer dan data sekunder.
2. Analisa Kesesuaian, berdasarkan teknik ini penulis bertujuan untuk melihat upaya-upaya apa saja yang dapat digunakan dalam menanggulangi kejahatan *cyberporn* yang dapat

digunakan di Indonesia dengan dibantu dengan interpretasi hukum.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **I. Bab 1 : Pendahuluan**

Dalam penelitian ini penulis membagi pendahuluan dalam beberapa sub bab diantaranya terdiri dari latar belakang sebagai penjelasan dan pengantar dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah dibagi menjadi dua permasalahan. Tujuan penulisan, merupakan penyampaian yang akan dilakukan oleh penulis dalam membuat penulisan skripsi ini. Manfaat penulisan terdiri dari aspek teoritik dan aspek praktis yang menjadi suatu penjelasan mengenai siapa dan apa saja yang akan mendapatkan manfaat dari penulisan ini. Serta kegunaan penulisan. Metode penulisan yang akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dalam melakukan analisis mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia.

### **II. Bab II : Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan penggunaan beberapa terminology yang akan digunakan oleh penulis guna memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Dalam tinjauan pustaka, maka batasan yang akan dibuat oleh penulis dengan menggunakan beberapa terminologi akan diuraikan dan dijabarkan sesuai dengan

kajian pustaka yang ada beserta pendapat para ahli yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian kepustakaan.

### III. Bab III : Pembahasan

Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis, dalam bab pembahasan maka semua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis akan diuraikan dan dijabarkan secara jelas oleh penulis sesuai dengan sumber yang didapatkan oleh penulis.

### IV. Bab IV : Penutup

Kesimpulan dan saran dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat terdapat dalam bab penutup yang akan menjadi masukan bagi instansi penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

